

Hukum Investasi dan Perlindungan Konsumen dalam Kasus Binomo: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor

Dhiny Ellen Juwita¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: dhiny.205230097@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan investasi daring, namun juga memunculkan berbagai bentuk penipuan investasi, termasuk binary option. Kasus Binomo menjadi perhatian publik karena banyak korban yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban binary option dan peran regulator dalam mencegah praktik investasi ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum preskriptif untuk mengkaji regulasi perlindungan konsumen dan investasi yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa regulasi yang relevan, masih terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para penipu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban binary option masih perlu diperkuat, terutama terkait penegakan hukum dan pemberian ganti rugi kepada korban. Di sisi lain, peran OJK dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan peningkatan efektivitas pengawasan sektor investasi di Indonesia.

Kata Kunci: Opsi Biner, Investasi Ilegal, Perlindungan Konsumen

Abstract

The rapid development of digital technology has encouraged the growth of online investment, but it has also given rise to various forms of investment fraud, including binary options. The Binomo case became a public concern because many victims suffered financial losses due to this fraud. The purpose of this study is to analyze the legal protection available to binary option victims and the role of regulators in preventing illegal investment practices. This research uses a prescriptive legal approach to examine consumer protection and investment regulations implemented in Indonesia. The research shows that although there are several relevant regulations, there are still legal loopholes that can be exploited by fraudsters. In addition, this research also examines the role of the Financial Services Authority (OJK) as a regulator in protecting consumers from illegal investment practices. This research concludes that legal protection for binary option victims still needs to be strengthened, especially regarding law enforcement and providing compensation to victims. On the other hand, OJK's role in supervising and educating the public is considered important to prevent similar incidents from recurring. This research provides recommendations for improving regulations and increasing the effectiveness of supervision of the investment sector in Indonesia.

Keywords: Binary Option, Illegal Investment, Consumer Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi akhir akhir ini sangat pesat, hal ini memiliki dampak perubahan, seperti transaksi sehari hari yang dilakukan tanpa melalui bentuk fisik nyata, namun dengan digitalisasi, transaksi mulai dilakukan secara online baik rupiah maupun dolar sudah beradaptasi sebagai mata uang digital. Dalam hal investasi juga terdapat perubahan dimana yang dulunya investasi dilakukan melalui perdagangan surat berharga, sekarang dilakukan melalui perdagangan berjangka komoditi. Perkembangan dalam bidang ini dapat dilihat dari jumlah investor kripto yang terus meningkat pesat saat pandemi Covid-19

dengan total investor 17,91 juta orang hingga September 2023¹. Namun banyaknya investor baru yang kurang pengetahuan dan pengalaman dalam tahap melakukan investasi dan dan rentan untuk mengalami kerugian. Kerugian seringkali diakibatkan oleh para investor yang mengikuti kelompok tertentu yang mewakili platform pertukaran mata uang digital yang tidak memiliki izin beroperasi. Salah satu dari bentuk investasi yang semakin marak adalah *trading*. *Trading* adalah jual beli surat berharga seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, dan derivatif, dengan tujuan memperoleh keuntungan.² Kegiatan ini dilakukan oleh perorangan, investor institusional, dan lembaga keuangan. *Trading* juga berbeda dengan investasi tradisional lainnya yang biasanya untuk jangka Panjang, sedangkan *trading* untuk jangka waktu yang pendek dengan memanfaatkan fluktuasi harga pasar untuk memperoleh keuntungan cepat. Binomo adalah aplikasi judi online yang berkedok menjadi salah satu platform trading online yang menyediakan aset seperti uang asing (*forex*), saham, emas dan perak.³ Binomo menggunakan sistem *binary option* dalam platformnya. *Binary Option* adalah perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset untuk jangka waktu tertentu.⁴

Opsi biner atau *binary option* merupakan salah satu bentuk instrumen perdagangan daring di mana para pedagang memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu.⁵ Namun dalam kasus ini, aplikasi ini hanya menguntungkan afiliatornya saja. Terdapat tujuh tersangka⁶ dan satu tersangka penipuan berkedok *binary option* Binomo dari kasus ini adalah Indra Kenz.⁷ Kasus penipuan investasi ini telah memakan korban sebanyak 118 orang dengan kerugian sebesar 72 miliar.⁸ Indra Kenz dijerat dengan Pasal 45A Ayat 1 juncto Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU.⁹ Oleh karena itu diperlukan regulasi yang ketat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan investor dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini didasarkan menurut amandemen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang diatur oleh kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dengan adanya kasus ini menjadi bukti tentang pentingnya regulasi dan perlindungan konsumen dalam konteks investasi digital. Kasus Binomo menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, investor dapat terjebak ke dalam praktik penipuan yang merugikan ini.¹⁰ Dan diharapkan dengan adanya regulasi yang ketat dan jelas dapat melindungi investor dari hal yang tidak diinginkan dan dapat memastikan semua transaksi dilakukan secara transparan dan adil. Karena hal ini termasuk hal yang masih baru, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang aman dan dengan langkah langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

¹Pratomo, G. Y., "3 Faktor Ini Genjot Pertumbuhan Jumlah Investor Kripto di Indonesia" (<https://integrasolusi.com/blog/catatan-kaki/>, Diakses pada 16 September 2024)

²Finserv, B., "What is Trading" (<https://www.bajajfinserv.in/what-is-trading>, Diakses pada 20 September 2024)

³Hadiwijaya, W. R., Hayatudin, A., dan Nurrachmi, I. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Binary Option. Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), 1(1), 1-15.

⁴CNBC Indonesia. "Kena Tipu Indra Kenz & Doni Salmanan, Apa Itu Binary Option" (<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220325095850-72-325920/kena-tipu-indra-kenz-doni-salmanan-apa-itu-binary-option>, Diakses pada 20 September 2024)

⁵Anonim, "5 Perbedaan Binary Option dan Trading Forex" (<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>, Diakses pada 20 September 2024)

⁶CNN Indonesia. "Deretan Tersangka Kasus Binomo, dari Kekasih Hingga Adik Indra Kenz" (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220411074202-12-783003/deretan-tersangka-kasus-binomo-dari-kekasih-hingga-adik-indra-kenz>, Diakses pada 20 September 2024)

⁷Alfarizi, M. K., "7 Tersangka Kasus Binomo, Apa Saja Peran Mereka" (<https://nasional.tempo.co/read/1581173/7-tersangka-kasus-binomo-apa-saja-peran-mereka>, Diakses pada 20 September 2024)

⁸Dewi, H. K., "Indra Kenz dan 6 Orang Tersangka Kasus Binomo" (<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi>, Diakses pada 20 September 2024)

⁹Putusan PN TANGERANG Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, 14 November 2022 (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

¹⁰Mantulangi, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Affiliator Binary Option. Universitas Lampung

terhadap pasar investasi digital dan terhindar dari penipuan seperti yang dialami oleh korban investasi Binomo.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *binary option* dari afiliator Binomo?
2. Bagaimana lembaga pengawas dapat melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal seperti kasus Binomo?

METODE PENELITIAN

Pendekatan Hukum Normatif

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa yurisprudensi. Pendekatan ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian berdasarkan ketetapan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Binary Option dari Afiliator Binomo

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak hak individu dan masyarakat dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah. Karena investasi digital termasuk hal yang baru dalam dunia investasi, perlindungan sangat penting untuk melindungi investor dari praktik penipuan dan kecurangan yang marak saat ini. Salah satu peristiwa yang muncul adalah praktik *Binary Option* atau opsi biner, di mana banyak investor menjadi korban dari mitra afiliasi seperti Binomo. Mengingat jumlah kasus penipuan investasi sangat banyak, penting untuk memahami mekanisme regulasi dan hukum yang ada untuk melindungi para korban. Untuk saat ini, status hukum *binary option* di Indonesia masih dalam perdebatan karena hal ini merupakan hal yang baru dan memiliki risiko yang tinggi bagi investor. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) belum mengatur secara jelas hal ini sebagai investasi yang sah.¹¹ Menurut BAPPEBTI, *binary option* tergolong dalam kategori perjudian dan belum pernah mendapat izin beroperasi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹² Keadaan ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak seperti Binomo untuk beroperasi tanpa pengawasan yang tepat. Dan dalam hal ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, mengingat bisnis di sektor keuangan ini sangat rentan terhadap penipuan. Terlepas dari hal ini, korban juga memiliki hak untuk melaporkan ke pihak berwajib seperti mengajukan keluhan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban *Binary Option*, beberapa regulasi terkait harus diperhatikan untuk memahami hak konsumen dan mekanisme hukum yang digunakan.

Regulasi tersebut memuat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan penyedia jasa untuk memberikan informasi yang jelas terkait risiko investasi. Contohnya, karena Pasal 9 mewajibkan penyedia jasa untuk memberikan informasi yang jelas terkait risiko informasi yang jelas terkait risiko investasi, maka korban Binomo dapat memilih untuk menggunakan ketentuan ini jika merasa tidak menerima informasi yang transparan dan dapat menggunakannya untuk menuntut rugi. Selain itu dalam

¹¹ Yusup, M. (2022). Tinjauan Trading Valuta Asing Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Prespektif Hukum Islam). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹² Mahardika, L. A., "Beppepti: Binary Option Ilegal di Indonesia" (<https://market.bisnis.com/read/20220126/94/1493578/bappebti-binary-option-ilegal-di-indonesia>, Diakses pada 21 September 2024)

kasus ini, affiliator yang hanya menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan dirinya sendiri dapat digugat dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa hanya operator terdaftar yang boleh menawarkan produk investasi. Praktik usaha Binomo tidak berizin dapat menjadi dasar pelaporan kepada pihak yang berwenang atas pelaksanaan kegiatan ilegal tersebut. Dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan kerangka hukum bagi korban untuk menuntut jika tindakan Binomo dianggap melawan hukum, khususnya terkait penipuan dan kelalaian. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya kelalaian, dan apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka korban dapat diupayakan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan. Melakukan tindakan untuk mengganti kerugian yang diderita. Adanya kelalaian, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara pelaku dan korban. Dengan adanya Undang undang dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai investasi yang aman, diharapkan agar korban mendapat keadilan dan ganti rugi akibat praktik penipuan dalam investasi ini, serta terhindar dalam praktik seperti ini di masa depan.¹³

Hal yang dilakukan lembaga pengawas untuk melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal seperti kasus Binomo

Investasi merupakan salah satu cara yang umum dilakukan masyarakat untuk mengembangkan aset dan mencapai tujuan keuangan. Namun, seiring dengan pertumbuhan sektor investasi, muncul pula berbagai praktik investasi ilegal yang merugikan konsumen. Kasus Binomo yang menjadi sorotan publik menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pengawas dalam melindungi masyarakat dari risiko tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia¹⁴ memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini.¹⁵ Peran OJK dalam Melindungi Konsumen:

1. Edukasi dan Literasi Keuangan. Edukasi merupakan langkah awal yang krusial dalam melindungi konsumen. OJK secara aktif melakukan kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap investasi yang aman beserta risiko yang menyertainya. Program edukasi tersebut meliputi:
 - a. Workshop dan Kursus: OJK menggelar berbagai workshop dan kursus di berbagai daerah untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang cara berinvestasi yang aman. Kegiatan ini melibatkan narasumber ahli yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang cara mengenali investasi yang sah dan berisiko rendah.
 - b. Materi Edukasi Berbasis Komputer: Melalui media daring, OJK menyediakan materi edukasi berupa video, artikel, dan infografis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan memanfaatkan teknologi, OJK dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih familiar dengan media berbasis komputer.
 - c. Kampanye Media Sosial: OJK memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi yang bertanggung jawab.

¹³ Lubis, D. P. R., (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Options Trading Pada Binomo. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁴OJK. "Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal" (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>., Diakses pada 21 September 2024)

¹⁵Otoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi" (<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8B%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan,kegiatan%20di%20sektor%20jasa%20keuangan,> Diakses pada 21 September 2024)

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum. Pengawasan ketat terhadap lembaga jasa keuangan merupakan salah satu fungsi utama OJK. Dalam konteks praktik investasi ilegal seperti Binomo, OJK melakukan:
 - a. Pengecekan Berkala: OJK secara rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menawarkan produk investasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk pengecekan dokumen dan proses investasi yang dilakukan oleh perusahaan.
 - b. Sanksi Administratif: Jika ditemukan pelanggaran, OJK berwenang memberikan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk mematuhi ketentuan yang ada.
 - c. Tindakan Hukum: OJK bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus investasi ilegal melalui proses hukum yang sesuai. Termasuk penyelidikan dan penuntutan terhadap individu atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
3. Pembentukan Satgas Waspada Investasi OJK membentuk Satgas Waspada Investasi sebagai respons atas maraknya laporan kegiatan investasi ilegal. Tugas pokok dari panitia khusus ini adalah:
 - a. Investigasi Insiden. Tim ini bertugas untuk melakukan investigasi atas laporan kegiatan investasi ilegal dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Berkat tim khusus ini, OJK dapat lebih cepat menanggapi laporan yang masuk.
 - b. Koordinasi dengan otoritas lain: Satgas ini bekerja sama dengan otoritas pemerintah lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk mempercepat penanganan kasus investasi ilegal.
4. Saluran Pengaduan OJK menyediakan saluran pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh praktik investasi ilegal¹⁶ Saluran tersebut meliputi:
 - a. Layanan Pengaduan Online: Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui situs web resmi OJK atau aplikasi seluler.
 - b. Pusat Layanan Konsumen: OJK juga memiliki Pusat Layanan Konsumen untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan memperoleh informasi lebih lanjut terkait hak-haknya. Pusat ini juga memberikan saran kepada masyarakat yang merasa terlibat dalam investasi ilegal.
5. Peraturan dan Pedoman OJK berwenang menerbitkan peraturan mengenai kegiatan investasi Indonesia. Langkah-langkah pengaturan meliputi:
 - a. Penegakan peraturan yang ketat: OJK menerbitkan peraturan pendaftaran dan izin usaha bagi perusahaan yang menawarkan produk investasi. Karena peraturan yang ketat, hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan yang diharapkan untuk beroperasi.
 - b. Sosialisasi peraturan baru: Setiap kali ada peraturan baru, OJK mengajak masyarakat untuk memahami perubahan dan dampaknya terhadap investasi.
6. Kerja sama antar otoritas Kerja sama OJK dengan lembaga lain sangat penting untuk memperkuat pengawasan kegiatan investasi ilegal. Bentuk kerja sama ini dapat berupa:
 - a. Pertukaran informasi: OJK bekerja sama dengan lembaga lain untuk bertukar informasi tentang potensi risiko dan pelanggaran di sektor investasi.
 - b. Kampanye bersama: Dalam beberapa kasus, OJK bekerja sama dengan lembaga lain dalam kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal.

¹⁶ Lestari, R. I., (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong. *Jurnal Juridica*, Volume 4 Nomor 1 2022.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban praktik investasi ilegal, khususnya dalam konteks binary option seperti pada kasus Binomo. Perlindungan hukum merupakan langkah penting dalam melindungi hak individu dan masyarakat dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak swasta. Investigasi menemukan bahwa status hukum binary option di Indonesia masih kontroversial, karena masih digolongkan sebagai perjudian dan tidak memiliki izin untuk mengoperasikannya. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk beroperasi tanpa pengawasan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi konsumen dari penipuan. Selain itu, OJK juga telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi konsumen, antara lain melalui edukasi dan literasi keuangan, pengawasan ketat terhadap lembaga jasa keuangan, pembentukan satuan tugas waspada investasi, dan penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko investasi dan memberikan kesempatan kepada korban untuk melaporkan kegiatan ilegal dan mencari ganti rugi. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Dan menunjukkan, penting bagi badan regulator untuk lebih memperkuat kerja sama antar lembaga dan mendorong penyebarluasan peraturan baru agar masyarakat dapat terlindungi secara efektif dan memadai. Dan dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan akan membantu para korban penipuan investasi mendapatkan keadilan dan kompensasi serta membantu menghindari tindakan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. K. "7 Tersangka Kasus Binomo, Apa Saja Peran Mereka"(<https://nasional.tempo.co/read/1581173/7-tersangka-kasus-binomo-apa-saja-peran-mereka>, Diakses pada 20 September 2024)
- Anonim. "5 Perbedaan Binary Option dan Trading Forex"(<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/5-perbedaan-binary-option-dan-trading-forex>, Diakses pada 20 September 2024)
- CNBC Indonesia. "Kena Tipu Indra Kenz & Doni Salmanan, Apa Itu Binary Option"(<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220325095850-72-325920/kena-tipu-indra-kenz-doni-salmanan-apa-itu-binary-option>, Diakses pada 20 September 2024)
- CNN Indonesia. "Deretan Tersangka Kasus Binomo, dari Kekasih Hingga Adik Indra Kenz"(<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220411074202-12-783003/deretan-tersangka-kasus-binomo-dari-kekasih-hingga-adik-indra-kenz>, Diakses pada 20 September 2024)
- Dewi, H. K. "Indra Kenz dan 6 Orang Tersangka Kasus Binomo"(<https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi>, Diakses pada 20 September 2024)
- Finserv, B. "What is Trading"(<https://www.bajajfinserv.in/what-is-trading>, Diakses pada 20 September 2024)
- Hadiwijaya, W. R., Hayatudin, A., dan Nurrachmi, I. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Binary Option. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 1(1), 1-15.
- Hartono, B., & Rahmawati, I. (2023). Analisis Hukum Terhadap Praktik Binary Option di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 45-60.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Indonesia. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Kumala, N. A., (2024). Analisis Legalitas Transaksional Binary Option di Indonesia. *Juristdictiction*, 7(1), 109-128. (<https://doi.org/10.20473/jd.v7i1.54836>)
- Lestari, R. I., (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong. *Jurnal Juridica*, Volume 4 Nomor 1 2022.
- Lubis, D. P. R., (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Binary Options Trading Pada Binomo. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahardika, L. A. "Beppepti: Binary Option Ilegal di Indonesia"(<https://market.bisnis.com/read/20220126/94/1493578/bappepti-binary-option-ilegal-di-indonesia>, Diakses pada 21 September 2024)
- Mahardika, L. A. "Dicap Ilegal oleh Bappebti, Begini Cara Kerja Binary Option"(<https://bisnis.espos.id/dicap-ilegal-oleh-bappebti-begini-cara-kerja-binary-option-1251198>, Diakses pada 20 September 2024)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan PN TANGERANG Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, 14 November 2022.
- Mantulangi, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Affiliator Binary Option. Universitas Lampung
- OJK. "Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal" (<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/116>., Diakses pada 21 September 2024)
- OJK. "Tugas dan Fungsi" (<https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8B%20otoritas%20jasa%20keuangan,kegiatan%20di%20sektor%20jasa%20keuangan>., Diakses pada 21 September 2024)
- Pramudito, A., & Fitria, N. (2023). Praktik Binary Option Bertopeng Investasi Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 55-72.
- Pratomo, G. Y. "3 Faktor Ini Genjot Pertumbuhan Jumlah Investor Kripto di Indonesia" (<https://integrasolusi.com/blog/catatan-kaki/>, Diakses pada 16 September 2024)
- Puspitasari, D., & Aulia, R. (2022). Praktik Binary Option Bertopeng Investasi Dari Perpektif OJK. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Diakses dari (<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/3596/2954>)
- Ramadhani, E. (2023). Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading. *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*. Diakses dari (<https://jurnal.adai.or.id/index.php/sintamai/article/download/463/316/2139>)
- Sari, D. (2021) *Risiko Investasi dalam Binary Options: Analisis Perbandingan dengan Forex Trading*, Jakarta, 2021
- Setiawan, R., & Lestari, P. (2023). Binary Options: Analisis Risiko dan Legalitas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 200-215.
- Supriyadi, A., & Yuliana, R. (2023). Keberadaan Binary Option Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia. *Recidive: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). Diakses dari (<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/83658>)
- Wibowo, A., & Sari, D. (2023). Binary Option sebagai Instrumen Perjudian di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 100-115.
- Yulianto, F., & Ningsih, S. (2023). Peran OJK dalam Pengawasan Binary Options di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(2), 120-135.
- Yusup, M. (2022). Tinjauan Trading Valuta Asing Platform Binary Option (Studi Kasus Aplikasi Binomo Dalam Prespektif Hukum Islam). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
-